Rabu, 5 Maret 2025
Edisi: 12720 | Thn. 53
HARIAN TERBIT
Koran Aspirasi Rakyat

Presiden Umumkan Langsung Kepastian THR ASN

Jakarta, HanTer - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan langsung kepastian mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disebutkannya saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, ketika dikonfirmasi oleh wartawan. "Nanti diumumkan Bapak Presiden, kami sedang siapkan. Insya Allah segera selesai," kata Sri Mulyani.

Saat ditanya mengenai detail THR ASN itu, Sri meminta wartawan untuk menanti lebih lanjut informasi yang akan disampaikan langsung oleh Presiden.

Adapun, dalam kunjungan ke Istana, Sri Mulyani menyebutkan pihaknya dijadwalkan bertemu Presiden untuk melakukan rapat internal membahas mengenai persiapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk 2026.

Terkait dengan THR ASN, sebelumnya pada Kamis (6/2), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

Saat ditemui di Jakarta, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya. Ia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

Hal ini juga diperkuat oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara merupakan hak yang akan tetap dibayarkan.

Ditemui di Jakarta, Jumat (7/2), pernyataan Hasan tersebut menanggapi isu pemerintah berencana menghapus THR dan gaji ke-13 ASN pada tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

■ **Safari**

ISTANA PASTIKAN BANTUAN KORBAN BANJIR DITANGANI OPTIMAL

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan bantuan untuk korban banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ditangani dengan optimal oleh badan dan lembaga terkait.

ISTIMEWA

HASAN NASBI

Jakarta, HanTer -- Menurut Hasan dalam taklimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih (KMP) disampaikan agar bantuan diberikan kepada korban banjir sebagai bagian dari penanggulangan bencana yang saat ini dipimpin prosesnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan dari Presiden ke badan penanggulangan bencana, BNPB," kata Hasan ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025)

Koordinasi antar anggota Kabinet Merah Putih (KMP) sudah dilakukan untuk memastikan korban banjir di Jabodetabek bisa mendapatkan penanganan yang baik sembari mencari solusi agar hujan yang sangat deras bisa diatasi sehingga tidak menambah titik-titik banjir di kemudian hari.

Terkait dengan bantuan sosial bagi korban banjir Jabodetabek, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memberikan pernyataan kepada awak media menyebutkan Kementerian Sosial telah mengucurkan bantuan senilai Rp3 miliar untuk mendukung penanganan banjir.

Beragam bantuan yang telah diberikan meliputi kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk dewasa dan anak, serta tenda untuk memastikan para pengungsi mendapatkan tempat yang layak.

Secara khusus terkait dengan banjir, Gus Ipul menyebutkan bahwa Presiden telah meminta seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga relawan saling bersinergi untuk menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Presiden menginstruksikan agar seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan relawan, bersinergi dalam penanganan bencana. Seperti yang selalu terjadi, setiap kali ada bencana, seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk memberikan bantuan, mulai dari evakuasi, pengungsian, hingga tahap rehabilitasi," kata Gus Ipul.

Menanggapi instruksi Presiden itu, Gus Ipul juga menegaskan bahwa seluruh sumber daya pemerintah, baik dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga relawan dari berbagai organisasi terus bekerja. "BNPB tetap menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, sementara Kementerian Sosial berperan dalam penyediaan logistik dan shelter," ujarnya.

■ **Safari**

> **Pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan dari Presiden ke badan penanggulangan bencana, BNPB**
>
> **Hasan Nasbi**

Pimpinan MPR Ingatkan Pemberian Tukin Dosen Bakal Berdampak pada Pendidikan

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan bahwa pemberian tunjangan kinerja (tukin) dosen harus segera cair karena akan berdampak pada kualitas pendidikan bangsa Indonesia.

"Sehingga tukin, tunjangan kinerja dosen ASN (aparatur sipil negara) menjadi penting. Kita harus ingat, bahwa pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan," kata Ibas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi kebangsaan dengan topik "Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas", Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dia menilai kesejahteraan dosen yang terpenuhi akan memberikan motivasi besar bagi para dosen dalam mendidik anak-anak bangsa.

"Karena kesejahteraan dosen yang terpenuhi berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda kita," ujarnya.

Namun, menurut dia, masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia saat ini.

"Meskipun demikian, hingga kini masih terdapat banyak kendala dalam proses implementasinya, mencakup keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen Kemendikbud dan dosen Kemenag serta tidak meratanya tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi," katanya.

Dia lantas membandingkan gaji dan tunjangan dosen-dosen dari negara lain dengan Indonesia.

ISTIMEWA

EDHIE BASKORO YUDHOYONO

"Tentu yang lebih maju gaji pokok dosen seperti bench mark di Australia, Singapura, Jepang itu sangat tinggi. Di Australia itu Rp90 juta, di Singapura sekitar Rp70 juta, di Jepang sekitar Rp40 juta, sementara Indonesia ini masih cukup minimalis," ucapnya.

Di sisi lain, dia mendorong dan memberikan perhatian untuk memastikan agar peningkatan tidak hanya dari tukin saja, melainkan kesejahteraan juga dirasakan secara berkelanjutan.

"Tidak hanya dosen, tapi juga TNI, Polri, ASN, dan profesi lainnya. Bahkan kawan tetangga kita di ASEAN saja, Filipina Rp6,9 juta dan Vietnam Rp6,5 juta, lebih tinggi dari Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, dia menyinggung bahwa tidak ada yang salah dengan aturan tukin dosen, menurut dia kelalaian dalam penganggaran tukin pada periode sebelumnya lah yang menjadi salah satu akar permasalahannya.

"Saya mendengar dan membaca bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan pihaknya akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini yang telah disetujui nominalnya sebesar Rp2,5 triliun oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan," ucapnya.

Menurut dia, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dosen adalah langkah yang sejalan dengan Empat Pilar Kebangsaan dan visi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo.

"Oleh karena itu, pemberian tukin harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita Pancasila," ujarnya.

Ibas meyakini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatikan pada nasib tukin para dosen yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di bidang pendidikan. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan perhatian yang diberikan pula pada kesejahteraan para hakim.

"Kami harap ekonomi Indonesia terus tumbuh, ruang fiskal kita cukup meningkat, maka pemerintah bisa melakukan revisi kebijakan untuk memberikan perhatian bagi dosen yang belum tersertifikasi sehingga kesenjangan kesejahteraan dan kualitas pengajaran di perguruan tinggi Indonesia dapat diminimalisir dan kemudian dapat lebih dinikmati oleh semua," tuturnya.

Meski demikian, dia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah semata, melainkan menjadi sebuah upaya bersama pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Peningkatan kesejahteraan dosen bukanlah tanggungjawab tunggal pemerintah semata, melainkan sebuah upaya bersama yang butuh dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholders yang berkepentingan, di antaranya akademisi, sektor swasta dan masyarakat," ujarnya.

■ **Danial**

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")
OBLIGASI WAJIB KONVERSI KIMIA FARMA I TAHUN 2023

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 ("**Obligasi Wajib Konversi**"), yang diterbitkan oleh PT Kimia Farma Tbk, suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Emiten**") berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023, Akta Nomor 04 tanggal 1 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Mkn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 ("**Pemegang Obligasi Wajib Konversi**") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 18 Maret 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Kimia Farma Tbk
Jl. Veteran Nomor 9, Jakarta Pusat

Agenda RUPO:
1. Penjelasan dari PT Kimia Farma Tbk ("Perseroan") dan Persetujuan terkait belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan yaitu belum terpenuhinya perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2023 dan laporan keuangan konsolidasi *unaudited* tanggal 30 September 2024.
2. Persetujuan penghapusan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan terkait kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus), mulai berlaku dari periode laporan keuangan tahunan *audited* 31 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2028 atau sampai seluruh Obligasi Wajib Konversi telah dilakukan konversi.
3. Persetujuan percepatan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi saham sebanyak 100% pada tanggal 17 April 2025 dalam rangka peningkatkan modal kerja Perseroan.
4. Persetujuan penundaan kewajiban pembayaran bunga Obligasi Wajib Konversi yang akan jatuh tempo pada 22 Agustus 2025, yang akan dibayarkan pada 22 Agustus 2027 dan persetujuan penghapusan denda terkait penundaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan perubahan Pasal 6 ayat 3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan dan pasal lain yang terkait serta mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sehubungan dengan dilakukannya perubahan akta-akta lain yang terkait.

Tata Cara Kuorum RUPO:
1. Berdasarkan Pasal 9 ayat 5 huruf a poin i Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO diselenggarakan atas usulan PT Kimia Farma Tbk selaku Emiten sehingga RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang Obligasi Wajib Konversi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat 4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Catatan:
1. Mengingat pentingnya penyelenggaraan RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi Wajib Konversi untuk menghadiri RUPO atau menunjuk kuasanya yang sah dan berwenang untuk hadir dalam RUPO dan untuk memberikan keputusan dalam RUPO.
2. Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI.
3. Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi Wajib Konversi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak dapat diunduh secara langsung dari situs web Emiten (http://www.kimiafarma.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pelaksanaan RUPO.
4. Seluruh Pemegang Obligasi Wajib Konversi dan/atau kuasanya ("**Peserta RUPO**") yang menghadiri RUPO wajib membawa dan menyerahkan:
   a. Asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI.
   b. Untuk Pemegang Obligasi Wajib Konversi Individu:
      i. Apabila hadir langsung dan tidak menggunakan kuasa maka Peserta RUPO membawa salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan dokumen asli ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO.
      ii. Apabila menggunakan kuasa, maka Peserta RUPO membawa dokumen berikut:
         • Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPO;
         • Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku dan dokumen asli bukti identitas diri tersebut dari penerima kuasa yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO.
   c. Untuk Pemegang Obligasi Wajib Konversi Badan Hukum atau Badan Usaha:
      i. Apabila yang akan hadir RUPO adalah Direksi/Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut dan tidak menggunakan kuasa, maka Peserta RUPO menunjukkan kepada Notaris dokumen berikut:
         • Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan dokumen asli bukti identitas diri yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO;
         • Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, Akta Perubahan yang terakhir, dan Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan memiliki kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
      ii. Apabila yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha, maka Peserta RUPO menunjukkan kepada Notaris dokumen berikut:
         • Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh Direksi/ Pengurus yang berwenang mewakili;
         • Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku, serta dokumen asli bukti identitas diri dari penerima kuasa, yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO;
         • Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, Akta Perubahan yang terakhir, dan Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan memiliki kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
   d. Hadir di tempat pelaksanaan RUPO 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPO dimulai.
5. Berdasarkan Pasal 9 ayat 4 huruf o Perjanjian Perwaliamanatan, maka Pemegang Obligasi Wajib Konversi atau kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi Wajib Konversi memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
6. Demi kelancaran RUPO, maka Pimpinan Rapat berhak menentukan prosedur RUPO yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam iklan pemanggilan ini.

Jakarta, 5 Maret 2025

WALI AMANAT — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
EMITEN — PT Kimia Farma Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU HT No.4 tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Jakarta Pluit sebagi Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II** tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (E-Auction) dengan penawaran secara terbuka (Open bidding) terhadap agunan debitur atas nama **AMAN SANTOSO** berupa :

4 bidang tanah dengan total luas 644 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya dengan rincian sebagai berikut :
1. SHM No. 95 dengan luas tanah 236 m²
2. SHM No 508 dengan luas tanah 80 m²
3. SHM No.504 dengan luas tanah 172 m²
4. SHM No.444 dengan luas tanah 156 m²
Keempat Sertipikat tersebut terdaftar atas nama AMAN SANTOSO setempat dikenal dengan **Jl Terate Raya No 15 A RT 009 RW 003 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta**
(Nilai Limit Rp. 6.500.000.000,- Uang Jaminan Rp. 1.300.000.000,-).

Pelaksanaan Lelang dilakukan pada :
Hari/Tanggal : Kamis / 20 Maret 2025
Batas Akhir Penawaran : Pukul 09:45 Waktu server e-Auction (sesuai WIB)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Jakarta II
Jl Prajurit KKO Usman & Harun No 10 Senen – Jakarta Pusat
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga Lelang
Pelunasan Harga Lelang : paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang

Keterangan :
- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh **KPKNL Jakarta II** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan ke rekening peserta yang sudah didaftarkan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Pemenang Lelang dikenakan PPN sebesar 1,1%

Syarat-syarat Lelang :
1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website ***www.lelang.go.id***. Syarat dan Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu ***"Tata Cara dan Prosedur"*** dan ***"Panduan Penggunaan"*** pada alamat website tersebut.
2. Obyek Lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi **apa adanya** *(as is)* sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada **KPKNL Jakarta II dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Jakarta Pluit.**
3. Peserta Lelang diwajibkan melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek Lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Jakarta Pluit, Telp. 021-22673317 atau HP. 081286680550 dan KPKNL Jakarta II di telp. 021 34835236

KPKNL JAKARTA II — BANK BRI

Jakarta, 05 Maret 2025
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Jakarta Pluit
Ttd
Edi Yuniarto
Pemimpin Cabang